

**BEBAN ADMINISTRASI DI DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH****Nurul Kholifah, Faqih Imam Muzaqi**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

e-mail : nurulkholifah1704@students.unnes.ac.id, faqihimmamuzaqi@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satu isu utama yang mungkin dihadapi oleh Disnakertrans adalah adanya beban administrasi yang tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pertemuan tatap muka dengan narasumber yang relevan dengan konteks penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen dari literatur, kebijakan, maupun dokumen-dokumen terkait. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang memungkinkan untuk memahami dan merinci aspek-aspek kualitatif berdasarkan isu yang diteliti. Penelitian ini menemukan bahwa beban administrasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dapat mencakup berbagai hal, seperti penyusunan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan, serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dan untuk menghadapi beban ini sebagian besar program pemerintah, terutama yang dikelola oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, menggunakan platform online dan media elektronik untuk memproses berbagai aspek ketenagakerjaan. Upaya ini membantu dalam memproses laporan masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja para pegawai Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : Beban administrasi, Disnakertrans, Provinsi Jawa Tengah**ABSTRACT**

The existence of the Manpower and Transmigration Office in Central Java Province as an implementing element of government duties in the employment and transmigration sector certainly does not always run smoothly. One of the main issues that may be faced by the Manpower and Transmigration Office is the existence of a high administrative burden. The research method used is an empirical juridical approach using a combination of primary data and secondary data. Primary data is obtained through interviews and face-to-face meetings with resource persons relevant to the research context, while secondary data is obtained through document

analysis of literature, policies, and related documents. The analytical approach used in this research is qualitative analysis, which allows for understanding and detailing qualitative aspects based on the issues studied. This study found that the administrative burden in the Central Java Provincial Manpower and Transmigration Office can include various things, such as the preparation of technical policies in the field of employment, community empowerment and transmigration, the implementation of government affairs and public services in the field of employment, guidance and implementation of tasks in the field of employment, and reporting the results of the implementation of main tasks and functions. And to deal with this burden most government programs, especially those managed by the Central Java Provincial Manpower and Transmigration Office, use online platforms and electronic media to process various aspects of employment. This effort helps in processing community reports more easily, quickly, and efficiently, so as to increase the effectiveness of the performance of Central Java Provincial Disnakertrans employees.

Keywords : Administrative burden, Manpower and Transmigration Office, Central Java Provincial

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menyumbang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di provinsi ini menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

Keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana tugas pemerintahan di sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan nasional. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 3, bersama dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertindak sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Dinas ini berada di bawah wewenang dan pertanggungjawaban Gubernur melalui Sekda, dan memiliki tanggung jawab inti dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas bantuan yang diberikan oleh kepala daerah¹.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi

¹ <https://disnakertrans.jatengprov.go.id/> (Diakses pada 4/11/2023 pukul 13.14).

Jawa Tengah dihadapkan pada kompleksitas administrasi yang tinggi. Administrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk kepada tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan². Tugas dan tanggung jawab yang besar membutuhkan pengelolaan yang cermat serta efisien. Administrasi yang tidak efisien dapat berdampak pada pelayanan yang kurang berkualitas kepada masyarakat, pengusaha, dan pekerja, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan ketenagakerjaan.

Salah satu isu utama yang mungkin dihadapi oleh Disnakertrans adalah adanya beban administrasi yang meningkat. Banyaknya laporan dan permintaan layanan yang masuk, perubahan regulasi, serta peningkatan teknologi dalam administrasi semuanya dapat menyebabkan beban administrasi yang berat. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, efisiensi administrasi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jateng, Mumpuniati, melaporkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 745 laporan berupa aduan dan permintaan informasi. Dari jumlah tersebut sekitar 700 aduan telah diterima dan diselesaikan melalui mediasi pembinaan atau jalur hukum. Sedangkan

pada awal tahun 2023 terdapat 56 aduan yang tersediri dari 41 aduan dan 11 permintaan informasi. Dari jumlah aduan itu, sebanyak 44 aduan sudah terselesaikan, mencapai 78,57%. Sedangkan 12 aduan sesanya atau sekitar 21,43% sedang dalam proses penyelesaian³.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang menyebabkan tingginya beban administrasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah terdapat strategi khusus yang dapat diidentifikasi dan diterapkan guna mengurangi beban administrasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah?

Melalui rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai beban administrasi pada Disnakertrans dan mengidentifikasi strategi potensial yang dapat digunakan untuk mengurangi beban administrasi, sejalan dengan tujuan peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan bagi masyarakat yang mendukung sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pertemuan tatap muka dengan narasumber yang relevan dengan konteks penelitian. Narasumber merupakan orang yang memberikan

² <https://kbbi.web.id/administrasi> (Diakses pada 4/11/2023 pukul 16.00).

³ <https://www.rri.go.id/hukum/157065/setahun-700-aduan-masuk-terkait-ketenagakerjaan> (Diakses pada 3/11/2023 pukul 13.30).

informasi terkait dengan situasi dan kondisi dalam latar belakang penelitian. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen dari literatur, kebijakan, maupun dokumen-dokumen terkait.

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang memungkinkan untuk memahami dan merinci aspek-aspek kualitatif berdasarkan isu yang diteliti. Analisis kualitatif memberikan hasil yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih mendalam. Melalui penggabungan data primer dan sekunder serta pendekatan analisis kualitatif, diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti dalam kerangka penelitian.

PEMBAHASAN

1. Permasalahan yang menyebabkan tingginya beban administrasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan dasar-dasar dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Salah satu hal yang berperan dan mempunyai kedudukan penting untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan pada sektor ketenagakerjaan. Dalam pembangunan nasional, pengembangan ketenagakerjaan seperti kualitas tenaga kerja sangat dibutuhkan⁴. Untuk mencapai hal ini tentu

diperlukan peran administrasi publik yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat, sehingga mampu menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dengan kesadaran tersebut di atas, Disnakertrans yang bertanggung jawab atas segala urusan mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi dituntut untuk mewujudkan kinerja yang optimal dengan melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, tentu akan ada banyak tantangan dalam praktiknya, perubahan-perubahan yang membawa banyak kemajuan di berbagai aspek dalam masyarakat, membuat sebuah organisasi diharuskan untuk bisa beradaptasi, perubahan ini membuat tuntutan, harapan, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik semakin meningkat⁵. Kondisi inilah yang membuat semakin meningkatnya beban administrasi pada pemerintahan, khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Beban administrasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dapat mencakup berbagai hal, seperti penyusunan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan transmigrasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan, serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

⁴ Zilda Clarita Reditania, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19," *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 40–54.

⁵ Mohamad Amin, "Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Bidang Administrasi Pemerintahan," *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 1, no. 2 (1 September 2020), <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i2.p137-152>.

Jika membahas mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi, tentu hal ini tidak lepas dengan pengangguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengangguran berarti orang yang menganggur (yang tidak mempunyai pekerjaan)⁶. Pengangguran juga bisa diartikan sebagai orang mungkin sedang mencari pekerjaan, bisa pekerjaan tetap ataupun pekerjaan sampingan. Tingkat pengangguran sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga angka pengangguran yang tinggi merupakan PR besar bagi Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang dijadikan tujuan oleh para pekerja asing. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja lokal yang mengalami penurunan, beberapa lapangan pekerjaan di Jawa Tengah lebih memilih tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja lokal. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Pada awal tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat bahwa ada sebanyak 16.398 orang pekerja asing yang berada di Jawa Tengah, para pekerja asing ini didominasi oleh para pekerja dari China⁷.

Peningkatan angka pengangguran ini juga disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menggempur perekonomian daerah yang mengakibatkan kenaikan angka pengangguran. Dalam wawancara kami bersama Bapak Arif Agre Dewanto, selaku Kasubbag Program Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, beliau mengatakan

bahwa adanya pandemi COVID-19 yang melanda beberapa tahun lalu mengakibatkan banyaknya usaha yang gulung tikar yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada banyak pekerja. Mereka yang terkena PHK pun akhirnya menjadi pengangguran yang mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan.

Angka pengangguran yang meningkat pastinya berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan yang semakin berkurang. Minimnya lapangan kerja di dalam negeri ini membuat masyarakat terpaksa untuk melakukan migrasi dan pekerjaan di luar negeri demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pemberdayaan tenaga kerja Indonesia dengan mengirimkannya ke luar negeri bisa dibidang adalah solusi yang tepat, tetapi hal ini juga menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan yang umum terjadi adalah para pekerja yang mendapatkan informasi terkait pekerjaan di luar negeri dari para calo, bukan dari instansi pemerintahan seperti Disnakertrans/BP2MI. Karena hal ini, pemerintah tidak bisa mengontrol pemberian informasi yang diberikan para calo. Akibatnya, para tenaga kerja Indonesia ini rentan untuk terkena pelanggaran-pelanggaran yang sering menimpa TKI di luar negeri, seperti penerimaan gaji yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, penempatan kerja yang tidak sesuai kontrak, pelecehan seksual, pengeksploitasian, atau bahkan dijadikan tenaga kerja ilegal⁸. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

⁶ <https://kbbi.web.id/anggur> (Diakses pada 4/11/2023 pukul 11.00).

⁷ Adam Anggi Anwar, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Periode 2002-2021 Analisis Data Time Series," *Jurnal Kendali Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 194–206.

⁸ Melisa Marty Ompi, "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *LEX PRIVATUM* 12, no. 2 (2023).

sebagai instansi yang mengawasi ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah daerah tentunya perlu memberikan pengawasan dan pemahaman pada masyarakat yang ingin menjadi TKI di luar negeri.

Ketika seseorang sudah mendapat pekerjaan, bukan berarti permasalahan yang dihadapi Disnakertrans selesai, seperti TKI yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri juga harus dilindungi. Berdasarkan pernyataan Bapak Agre dalam wawancara kami, beliau mengatakan bahwa mayoritas hal yang sering dikeluhkan masyarakat adalah perselisihan dalam hubungan industrial. Hubungan industrial tidak selalu berjalan dengan mulus, karena di dalamnya pasti akan ada perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan perbedaan visi antara manajemen dan pekerja yang dapat memicu konflik pada hubungan ketenagakerjaan yang terjadi. Konflik yang terjadi diantaranya seperti ketidaksesuaian hak, ketidaksesuaian kepentingan, dan ketidaksesuaian antar pekerja dalam suatu perusahaan⁹. Peran Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah disini adalah untuk menciptakan lingkungan pada sektor industrial yang baik, sehingga konflik atau perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan atau bahkan diminimalisir sebelum terjadi.

Masalah selanjutnya yang menjadi beban Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah adalah mengenai para pekerja anak di bawah umur. Sebenarnya, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai larangan atau

pembatasan tenaga kerja anak dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi dalam prakteknya peraturan seringkali diabaikan terutama karena kondisi ekonomi¹⁰. Kondisi ekonomi yang berada mengancam, mendorong anak-anak untuk melakukan pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal, seharusnya anak-anak dilindungi dan diberikan kesempatan untuk belajar, bermain, dan mengembangkan dirinya masing-masing. Tiap tahunnya, masalah mengenai pekerja anak ini terus saja meningkat dan memburuk, bahkan terkadang pekerjaan yang dikerjakan cenderung mengeksploitasi anak yang membahayakan mental, fisik, dan perkembangan sosialnya. Bahkan dalam wawancara kami bersama Bapak Arge, beliau sangat menyayangkan hal buruk yang harus terjadi kepada anak-anak ini. Beliau juga mengatakan sedang berusaha mengatasi mengenai pengeksploitasian pekerja anak agar kedepannya bisa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

Sebagai pelayan publik, Disnakertrans tentu harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Akan tetapi, akibat dari pandemi yang menyerang beberapa tahun lalu membuat segala aktivitas tatap muka menjadi terbatas. Sementara itu, disisi lain, kewajiban sebagai pelayan publik mengharuskan semua pejabat negara untuk menyelenggarakan pelayanan dan melaksanakan program kerja sebagaimana

⁹ Firdausi Dhulhijjahyani, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Mohammad Nuh, "MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Dalam Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Pasuruan)," *PROFIT: JURNAL ADMINISTRASI BISNIS* 14, no. 1 (2020): 32–41.

¹⁰ Adrina Pungkasari, "Problematisa Ketenagakerjaan Anak Di Indonesia Dan Cara Menanggulangnya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 13661–70.

yang sudah disusun¹¹. Solusi dari masalah ini adalah pemanfaatan teknologi, dimana teknologi memang tidak terikat pada pembatasan waktu dan tempat. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Agre dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa teknologi ini membuat pelayanan lebih efektif dan efisien, sebab, orang-orang tidak perlu mengantri. Teknologi ini juga dianggap lebih ramah lingkungan, karena para pelapor/pengadu tidak perlu menuliskan formulir di kertas. Pengumpulan arsip dan berkas-berkas juga tidak memerlukan kertas, karena semuanya bisa dilakukan secara online. Jika dilihat secara sekilas, hal ini mungkin terlihat sangat praktis. Tetapi faktanya, masih banyak orang di luar sana masih buta akan teknologi, sehingga, pemanfaatan teknologi dalam ruang lingkup kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ini mungkin tidak bisa dinikmati atau diakses oleh semua orang. Ini bisa terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Hal ini yang selanjutnya menjadi permasalahan dan beban administrasi yang perlu diperhatikan dan ditindak lebih jauh oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

2. Strategi khusus yang dapat diidentifikasi dan diterapkan guna mengurangi beban administrasi di Disakertrans Provinsi Jawa Tengah

Disnakertrans adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah ketenagakerjaan. Di bawah kepemimpinan seorang Kepala

Dinas, Disnakertrans beroperasi dengan arahan dan pengawasan Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Peran utama Disnakertrans adalah memberikan dukungan kepada Bupati atau Walikota dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi¹². Untuk mencapai tujuan tersebut, Disnakertrans Provinsi Jateng menjalankan berbagai fungsi, yang meliputi¹³:

1. Merumuskan kebijakan terkait pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, dan jaminan sosial, serta mengawasi ketenagakerjaan.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan melakukan pengawasan ketenagakerjaan.
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan terkait pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan.
4. Menjalankan dan membina administrasi di seluruh unit kerja yang berada di bawah lingkungan Dinas.
5. Menjalankan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan melaksanakan fungsi-fungsi ini, Disnakertrans Provinsi Jateng berperan penting dalam mendukung pengembangan

¹¹ Kiki Ahmad Baihaqi dan Candra Zonyfar, "PENGUNAAN TEKNOLOGI DAN PEMANFAATANNYA UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK," *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG* 3, no. 1 (2023): 1446–50.

¹² Lilis Nur Hayati dan Suarni Suarni, "SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR DISNAKER KOTA MAKASSAR BERBASIS WEB," *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE* 6, no. 1 (2018): 2–10.

¹³ <https://disnakertrans.jatengprov.go.id/> (Diakses pada 4/11/2023 pukul 13.14).

dan pengawasan sektor ketenagakerjaan serta transmigrasi di wilayah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentunya Disnakertrans sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengelola urusan pada bidang tenaga kerja dan transmigrasi memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan pemerintah pada bidang tersebut dapat terealisasi dengan baik. Hal ini termasuk dalam upaya untuk meningkatkan lapangan kerja, memberikan pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi transmigrasi penduduk antar daerah.

Selain mempunyai tanggung jawab langsung terhadap masyarakat, Disnakertrans juga harus menghadapi beban administratif yang semakin kompleks. Hal ini mencakup pengelolaan data dan dokumen yang akurat, pelaporan kegiatan, juga koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Seluruh tugas ini tentunya menambah beban kerja dan berpotensi memengaruhi efisiensi dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Karena itu, Disnakertrans terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi administrasinya, seperti dengan melibatkan teknologi informasi yang dapat membantu pada proses administratif. Dengan cara ini, Disnakertrans dapat lebih fokus pada tugasnya dalam memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjalankan kebijakan yang mendukung tenaga kerja dan transmigrasi yang berkualitas di Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi

Jawa Tengah mengambil langkah penting untuk menangani laporan masyarakat yang datang secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat ditangani secara maksimal. Upaya ini dilakukan dengan menawarkan berbagai media dan platform akses online yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Contoh platform ini termasuk aplikasi Tata Praja, *E-Makaryo*, situs *website* resmi Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, serta akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, maupun email yang terbuka untuk masyarakat.

Disnakertrans menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah, termasuk dalam program prioritas Gubernur yang mencakup pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)¹⁴. Sebagian besar program pemerintah, terutama yang dikelola oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, menggunakan platform online dan media elektronik untuk memproses berbagai aspek ketenagakerjaan. Upaya ini membantu dalam memproses laporan masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja para pegawai Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan portal online ini tidak hanya memudahkan proses laporan dari masyarakat tetapi juga memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan secara maksimal. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub-bagian Program Disnakertrans Jawa Tengah, Arif Arge Dewanto, ditemukan bahwa berkat kehadiran platform pelaporan yang lebih

¹⁴ <https://jatengprov.go.id/publik/pj-gubernur-jateng-genjot-10-program-prioritas/> (Diakses pada 4/11/2023 pukul 13.52).

mudah diakses, survei mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mencapai 90%.

Selain itu, Disnakertrans Jawa Tengah juga mengambil inisiatif dalam mengedukasi masyarakat tentang program-program yang mereka jalankan. Mereka menggunakan saluran YouTube sebagai sarana untuk menyediakan video-video edukatif yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang isu-isu ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh Disnakertrans. Dengan langkah-langkah ini, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah bekerja aktif untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang diberikan. Sehingga tujuan untuk menjahterakan masyarakat akan dengan lebih mudah untuk dicapai.

Selain mengedukasi Masyarakat melalui platform-platform online, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah juga mengadakan program-program yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang ketenagakerjaan dan administrasi. Untuk mengurangi angka pengangguran, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah mengadakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang nantinya masyarakat yang dilatih ini siap ditempatkan di lapangan kerja yang dikelola oleh Disnakertrans ataupun di luar itu. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini memiliki 4 BLK yang tersebar di Jawa Tengah. Untuk penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial, Disnakertrans juga menawarkan

Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) yang saat ini masih hanya ada di Semarang. Disnakertrans juga saat ini sedang mengupayakan mengenai regulasi untuk perlindungan TKI di luar negeri dan perlindungan tenaga kerja anak di bawah umur.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah memiliki peran untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan pada sektor insdustrial dan ketenagakerjaan. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, sebagai lembaga yang mengurus segala urusan mengenai ketenagakerjaan dan transmigrasi dituntut untuk melakukan yang terbaik di bidangnya. Tetapi dalam praktiknya tentu akan ada permasalahan-permasalahan di sektor ketenagakerjaan yang menyebabkan tingginya beban administrasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi diantaranya terkait pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan ataupun pengangguran karena kurangnya kompetensi seseorang, pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, perselisihan dalam hubungan industrial, bertambahnya angka para pekerja anak di bawah umur, hingga masalah teknis pada pelayanan di Disnakertrans.

Berbagai upaya sudah dilakukan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Mereka menangani berbagai lakukan mulai menangani laporan secara langsung maupun tidak langsung. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan media dan platform online, seperti aplikasi "tata praja", BSE, situs website resmi

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, serta akun media sosial yang terbuka untuk masyarakat. Sosial media seperti YouTube berisi konten-konten untuk mengedukasi masyarakat mengenai program-program yang mereka lakukan. Disnakertrans benar-benar memaksimalkan adanya platform online baik dalam hal teknis maupun nonteknis.

Saran

- a. Bagi *stakeholders* setempat, yaitu DPRD dan Biro Hukum untuk bisa selalu berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Biro hukum sebagai pembantu asisten pemerintahan, dapat membantu dengan memberikan bantuan hukum, melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perumusan kebijakan produk hukum dan telaah hukum. Bagi DPRD, untuk ikut membantu dalam pembentukan peraturan daerah yang dibutuhkan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda.
- b. Bagi Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, perlu meningkatkan pola komunikasi, baik dengan masyarakat ataupun perusahaan, sehingga terjalin komunikasi dua arah. Dengan pola komunikasi dua arah ini, diharapkan Disnakertrans bisa menerima respon dan aspirasi dari para tenaga kerja maupun perusahaan. Diharapkan juga, Disnakertrans bisa memberikan pengawasan dan perlindungan lebih kepada para pekerja anak di bawah umur, sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

- Amin, Mohamad. “Pengaruh Profesionalisme Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Pemerintahan.” *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 1, no. 2 (1 September 2020). <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i2.p137-152>.
- Anwar, Adam Anggi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Periode 2002-2021 Analisis Data Time Series.” *Jurnal Kendali Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 194–206.
- Baihaqi, Kiki Ahmad, dan Candra Zonyfar. “PENGUNAAN TEKNOLOGI DAN PEMANFAATANNYA UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK.” *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG* 3, no. 1 (2023): 1446–50.
- Dhulhijjahyani, Firdausi, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Mohammad Nuh. “MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Dalam Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan).” *PROFIT: JURNAL ADMINISTRASI BISNIS* 14, no. 1 (2020): 32–41.
- Hayati, Lilis Nur, dan Suarni Suarni. “SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN PADA KANTOR DISNAKER KOTA MAKASSAR BERBASIS WEB.” *SEMNAS TEKNOMEDIA ONLINE* 6, no. 1 (2018): 2–10.
- Ompi, Melisa Marty. “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” *LEX PRIVATUM* 12, no. 2 (2023).
- Pungkasari, Adrina. “Problematika Ketenagakerjaan Anak Di Indonesia Dan Cara Menanggulangnya.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 13661–70.
- Reditania, Zilda Clarita. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA PADA

MASA PANDEMI COVID-19.” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023): 40–54.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Website

<https://disnakertrans.jatengprov.go.id/>
(Diakses pada 4/11/2023 pukul 13.14).

<https://kbbi.web.id/administrasi> (Diakses pada 4/11/2023 pukul 16.00).

<https://www.rri.go.id/hukum/157065/setah-un-700-aduan-masuk-terkait-ketenagakerjaan> (Diakses pada 3/11/2023 pukul 13.30).

<https://kbbi.web.id/anggur>. (Diakses 4/11/2023 pukul 11.00).

<https://jatengprov.go.id/publik/pj-gubernur-jateng-genjot-10-program-prioritas/> (diakses pada 4/11/1023 pukul 13.52).